**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROCUREMENT FRAUD**

**(Studi Kasus Pada Auditor Independen di Kantor Akuntan Publik Kota Yogyakarta)**

**Ni Kadek Dwi Karina**

**Universitas Mercu Buana Yogyakarta**

**Kadekdwikarina2@gmail.com**

Abstrac

This study examines factors affecting fraud in the procurement of government’s goods and services from the independent auditor’s point of view. Based on fraud triangles, this study proposes four hypotheses. This study used primary data gathered by survey to auditors of Public Accounting Firm in Yogyakarta City. Respondents were asked to provide their answer or perception for questions in questionnaire regarding factors influencing the procurement fraud of government’s goods and services. The results show that the procurement frauds are significantly influenced by weaknesses in procurement system, lack of procurement committe’s quality, and the intention to engage fraud. These findings suggest that procurement frauds are associated with individual factors as rationalization and opportunities. These factors could be considered when designing internal control structure to restrain fraud behavior.

Keywords : procurement fraud, fraud triangle, pressure, system weakness, quality, intention

Abstrak

Penelitian ini menguji faktor-faktor memengaruhi perilaku fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari perspektif persepsian auditor independen. Mengacu pada fraud triangle, penelitian ini mengusulkan empat hipotesis. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan metode survei kepada auditor independen Kantor Akuntan Publik di Kota. Responden diminta untuk memberikan jawaban atau persepsinya atas pertanyaan dalam kuesioner terkait faktor-faktor yang memengaruhi fraud atas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah dipengaruhi secara signifikan oleh adanya kelemahan dalam sistem pengadaan, kurangnya kualitas pelaksana pengadaan, serta adanya niat fraud dari pelaksana pengadaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dikaitkan dengan faktor individual yang tercermin dalam rasionalisasi dan adanya peluang. Kedua faktor ini dapat dipertimbangkan dalam mendesain struktur pengendalian intern yang efektif dengan tujuan untuk mencegah fraud.

Kata kunci : fraud dalam pengadaan, segitiga fraud, tekanan, kelemahan sistem, kualitas, niat.

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang besar, tindak pidana korupsi di Indonesia sampai saat ini masih banyak terjadi, Hemamusa (2011) menyebutkan bahwa penyebab kecurangan (fraud) atas barang dan jasa pada tingkat panitia pengadaan adalah integritas yang lemah, proses pengadaan yang tidak transparan, panitia pengadaan yang memihak, dan panitia pengadaan yang tidak independen.

Pengadaan barang dan jasa memang masih menjadi faktor yang sangat rentan terhadap korupsi. Meskipun Pemerintah melalui Keppres No. 80 Tahun 2003 sudah berusaha mengatur agar proses pelaksanaan ini dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel. Namun di setiap daerah secara umum terdapat kesamaan pendapat bahwa proses pengadaan barang dan jasa masih sangat rentan terhadap tindak korupsi.

Kualitas panitia pengadaan barang dan jasa adalah apakah tim yang telah diangkat untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa telah memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan. Panitia pengadaan merupakan salah satu subyek (pelaku) pengadaan barang dan jasa pemerintah dan aktivitas serta keputusan yang dilakukannya akan sangat menentukan jalannya proses pengadaan. Segala aktivitas dan keputusan yang diambil oleh panitia pengadaan merupakan hal yang sangat krusial ka rena berhadapan langsung dengan muatan kepentingan dari berbagai subyek pengadaan barang dan jasa lainnya.

. Donald R. Cressey (Priyatna, 2012) beranggapan bahwa seseorang melakukan fraud dapat terjadi karena dipicu tiga faktor, yaitu adanya tekanan (pressure), peluang (opportunities), dan rasionalisasi (rationalization), yang dikenal dengan fraud triangle.

Faktor pertama pressure sering diidentikkan sebagai financial pressure yang sering menjadikan seseorang berbuat financial fraud. Rijckeghem dan Weder (1997) serta Lambsdorff (1999) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari penghasilan yang kurang memadai terhadap tingkat korupsi.

Faktor kedua adalah opportunities. Faktor tersebut memungkinkan seseorang melakukan fraud atau penyalah gunaan wewenang yang memungkinkan tidak mudah diketahui atau terdeteksi. Peluang ini dapat terjadi karena sistem pengendalian intern yang lemah, etika, dan lingkungan pengadaan yang mendukung dan menganggap seseorang yang dipercaya tidak melakukan kecurangan Poernomo (2013b) menyatakan bahwa adanya sistem pengendalian yang lemah serta kurangnya kualitas memberikan peluang para pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penyimpangan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Schuchter dan Levi (2015) yang menyatakan bahwa opportunities dapat terjadi karena kelemahan pengendalian internal organisasi, tidak adanya transparansi, dan juga kurang efektifnya pengendalian intern sehingga menjadikan kecurangan mudah terjadi. Faktor opportunities dilihat dari segi lemahnya sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah serta kurangnya kualitas panitia pengadaan berpengaruh pada tindakan berbuat fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah

Faktor ketiga dari fraud triangle adalah rationalization. Rationalization merupakan sebuah pandangan bahwa pada dasarnya orang itu dapat dipercaya, kalaupun yang bersangkutan berbuat kecurangan atau fraud, hal tersebut tidak membuat yang bersangkutan menganggap dirinya sebagai fraudster sehingga apabila tertangkap karena kecurangannya, mereka menganggap bahwa mereka adalah korban dari sistem atau lingkungan yang tidak baik atau lingkungan yang menganggap perbuatan fraud adalah biasa dan pantas. Faktor ketiga ini sangat menarik untuk dikaji selain kedua faktor di atas. Faktor rasionalisasi (rationalization) terkait dengan besarnya niat untuk berbuat fraud berpengaruh pada tindakan fraud, komponen moral dan psychological yang sangat penting untuk dipahami apa yang menyebabkan tindakan tidak etis yang dapat menuju pada tindakan fraud (Cohen et al. 2010)

Fraud sendiri sulit untuk dideteksi karena tindakan fraud bersifat tersembunyi dan para pelakunya cenderung cerdas, pekerja keras, dan memiliki profil jujur dengan catatan kriminalitas yang sedikit, masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah:(1).Apakah tekanan (pressure), dari segi pendapatan panitia pengadaan berpengaruh pada tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut persepsi auditor independen di kota Yogyakarta.(2).Apakah lemahnya sistem dan prosedur (sysweak) pengadaan berpengaruh pada tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut persepsi auditor independen di kota Yogyakarta.(3).Apakah kurangnya kualitas (quality) panitia pengadaan berpengaruh pada tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut persepsi auditor independen di kota Yogyakarta.(4.)Apakah niat (intent) berbuat fraud berpengaruh pada tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut persesepsi auditor independen di kota Yogyakarta.

Tujuan penelitian ini adalah:(1.)Untuk mengetahui tekanan (pressure) dari segi pendapatan panitia pengadaan berpengaruh pada tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut persepsi auditor independen di kota Yogyakarata.(2).Untuk mengetahui lemahnya sistem dan prosedur (sysweak) pengadaan berpengaruh pada tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut persepsi auditor independen di kota Yogyakarta. (3).Untuk mengetahui kurangnya kualitas (quality) panitia pengadaan berpengaruh pada tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut persepsi auditor independen di kota Yogyakarta.(4).Untuk mengetahui niat (intent) berbuat fraud berpengaruh pada tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut persepsi auditor independen di kota Yogyakarta.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun pihak – pihak serta manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain :(1).Bagi Universitas, hasil penelitian ini dapat menjadi koleksi kepustakaan di Universita Mercu Buana Yogyakarta.(2).Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat menjadi tempat untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Selain itu, penulis memperoleh ilmu pengetahuan baru khususnya topic yang dibahas pada skripsi ini yaitu tentang Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif.(3).Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini dapat member tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa tentang bidang baru dalam pengauditan.manfaat ilmu pengetahuan ini khususnya akan lebih di rasakan oleh mahasiswa yang tertarik dalam bidang ilmu pengetahuan.

**TINJAUAN PUSTAKA dan PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

**Procurement**

Pengertian kata procurement yang dalam terjemahan bahasa indonesianya berarti pengadaan, menurut Weele (2010) Pengadaan adalah perolehan barang atau jasa. Hal ini menguntungkan bahwa barang atau jasa yang tepat dan bahwa mereka yang dibeli dengan biaya terbaik untuk memenuhi kebutuhan pembeli dalam hal kualitas dan kuantitas, waktu dan lokasi. Menurut Cristopher and Schooner ( 2007) Procurement adalah pengadaan atau kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa atau procurement adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan dilihat dari kebutuhan dan penggunaannnya, serta dilihat dari kualitas, kuantitas, waktu pengiriman dan harga yang terjangkau. Menurut Budihrajo Hardjowijono dan Hayie Muhammad (2008) pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekkan secara internasional efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan transparansi, tidak diskriminasi dan akuntabilitas. Menurut Turban ( 2010, p251) setiap perusahaan menggunakan metode yang berbeda dalam memperoleh produk dan jasa yang tergantung apa dan dimana mereka membeli, kuantitas yang dperlukan, berapa jumlah uang yang terpakai dan sebagainya.

1. Audit

Menurut The Report of the Committee on Basic Auditing Concep of the American Accounting Association dalam Boynton dan Johnson ( 2006:6), auditing didefinisikan sebagai suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai asersi atau pernyataan tentang kegiatan ekonomi dan peristiwa untuk memastikan derajat korespndensi antara asersi tersebut dan kriteria yang ditetapkan serta mengomunikasikan hasil tersebut kepada pengguna yang berkepentingan. Menurut Bayangkara (2008:4) aktivitas audit terdiri dari empat jenis yang dibedakan berdasarkan tujuannya, antara lain:

(1) Audit laporan keuangan, bertujuan untuk menentukan apakah laporan audit telah disusun sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2) Audit kepatuhan, bertujuan untuk menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, kebijakan, rencana, dan prosedur.

3) Audit internal, bertujuan untuk menilai keandalan laporan keuangan, menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas, menilai pengendalian internal organisasi, menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, serta program peninjauan terhadap konsistensi hasil dengan tujuan organisasi.

4) Audit operasional dan audit management, bertujuan untuk menilai efisisensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam suatu entitas.

Berdasarkan profesinya audit dibagi menjadi auditor indetrnal, auditor eksternal, auditor pemerintah dan auditor forensik.

Fraud

Mendefinisikan fraud sebagai suatu pembohongan atau penipuan (deception) yang dilakukan demi kepentingan pribadi. G. Jack Bologna, Robert J.Lindquist dan Joseph T.Wells (1993:3) dalam Suroso ( 2011) mendefinisikan fraud “ Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver” yaitu fraud adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk member manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat.

Faktor pendorong seseorang melakukan tindakan fraud, juga dapat dijelaskan melalui Gone Theory, Bologna (1993) dalam Suroso (2011) mengemukakan Gone Theory terdiri atas :

1) Greed (keserakahan)

Greed berkaitan dengan keserakahan seseorang yang tidak puas pada keadaan dirinya.

2) Opportunity (kesempatan)

Opportunity merupakan system yang memberikan peluang untuk terjadinya fraud (Effrianto et al.,2015).

3) Need (kebutuhan)

Need merupakan sikap mental yang tidak pernah merasa cukup.

4) Exposures ( hukuman untuk efek jera)

Exposures berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku fraud apabila pelaku ditemukan melakukan fraud ( Soepardi, 2010).

Fraud terdiri dari tiga jenis penyimpangan, menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Jatiningtyas dan Kiswara (2011) membagi fraud dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:

1) Penyimpangan atas aset (Asset Misappropriation) Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (defined value).

2) Pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent Statement) Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (financial engineering) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing

3) Korupsi (Corruption) Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (conflict of interest), penyuapan (bribery), penerimaan yang tidak sah/illegal (illegal gratuities), dan pemerasan secara ekonomi (economic extortion).

Pelaku kecurangan dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok, yaitu manajement dan karyawan atau pegawai. Pihak manajemen melakukan kecurangan biasanya untuk kepentingan perusahaan, contoh kecurangan yang dilakukan oleh manajemen yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan ( misstetaments arising from fraudulent financial reporting). Sedangkan karyawan atau pegawai melakukan kecurangan bertujuan untuk kepentingan individu, misalnya salah saji yang berupa penyalah gunaan aktiva (misstatement arising from misappropriation of assets).

Donald R. Cressey yang dikutip oleh Tuanakotta (2010) membuat suatu model klasik untuk menjelaskan occupational offender atau pelaku fraud dalam hubungan kerja, dan penelitian tersebut diterbitkan dengan judul People’s Money: A Study in the Social Physicology of Emblezzment dengan hipotesis terakhir:

“Trusted person become trust violators when they conceive of themselves as having a financial problems can be secretly resolved by violation of the position of financial trust, and are able to apply to their own conduct in that situation verbalizations which enable them to adjust their conception of themselves as trusted person with their concenptions of themselves as users of the entrusted funds or property.”

yang berarti bahwa orang yang dipercaya menjadi pelanggar kepercayaan ketika ia melihat dirinya sendiri sebagai orang yang mempunyai masalah keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain, sadar bahwa masalah ini secara diam-diam dapat diatasi dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemegang kepercayaan di bidang keuangan, dan tindak tanduk sehari-hari memungkinkan menyesuaikan pandangan mengenai dirinya sebagai seseorang yang bisa dipercaya dalam menggunakan dana atau kekayaan yang dipercayakan.

Fraud Triangle

Fraud Triangle tersebut menunjukkan bahwa seseorang melakukan kecurangan didasarkan atas 3 faktor tersebut, yaitu:

1) Pressure (tekanan). Cressey mempercayai bahwa pelaku kecurangan bermula dari suatu tekanan yang menghimpitnya. Pelaku mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak, yang tidak diceritakan kepada orang lain. Konsep yang penting disini adalah tekanan yang menghimpit hidupnya (kebutuhan akan uang), padahal ia tidak bisa berbagi dengan orang lain.

2) Opportunity (Kesempatan). Pelaku kecurangan memiliki persepsi bahwa ada peluang baginya untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui orang lain. Cressey berpendapat bahwa ada dua komponen dari persepsi tentang peluang. Yang pertama, general information, yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung trust atau kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Pengetahuan ini dapat diperoleh dari apa yang ia dengar atau yang ia lihat. Kedua adalah technical skill atau keahlian/keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kecurangan tersebut.

3) Razionalization atau mencari pembenaran sebelum melakukan kecurangan bukan sesudah. Pembenaran merupakan bagian yang harus ada di dalam tindakan kejahatan itu sendir, bahkan merupakan bagian dari motivasi pelaku.

**Sejarah Kantor Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) tumbuh dari cikal bakalnya, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PPKPBJ) yang dibentuk pada tahun 2005. Sebagai unit kerja Eselon II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, PPKPBJ memiliki tugas Penyusunan kebijakan dan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Seiring reformasi yang bergulir di Indonesia, muncul harapan agar pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak. Selain lingkup dan cakupan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang luas, bersifat lintas institusi dan lintas sektor, juga berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, peningkatan produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya.

**Kerangka Pemikiran Teoretis dan Pengembangan Hipotesis**

Pressure dari segi pendapatan panitia pengadaan dapat menjadi faktor yang memengaruhi tindakan fraud. Penghasilan yang kurang memadai dapat menimbulkan financial pressure (Lambsdorff 1999). Apabila pendapatan atau honor sebagai panitia pengadaan barang dan jasa yang kecil tidak sebanding dengan beratnya beban kerja dan tingginya risiko, maka sering menjadi pembenaran dalam melakukan fraud (Cressey 1973). Rezaee (2005) juga menyatakan bahwa insentif yang kurang memadai dapat berpengaruh terhadap fraud dalam penyajian pelaporan keuangan. Cohen et al. (2010) menguji bahwa perilaku fraud juga didorong oleh financial pressure. Mengacu pada fraud triangle theory yang dikembangkan oleh Cressey (1973), financial pressure merupakan faktor yang dapat memicu adanya perilaku fraud.

Tersedianya sistem dan prosedur (sysweak) yang baik akan memberikan panduan para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang atau jasa bekerja secara terarah dalam mencapai tujuan pengadaan yang ekonomis, efektif, dan efisien. Thai (2001) menyatakan bahwa sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa berpengaruh dalam keberhasilan suatu sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, lack of corporate governance seperti lemahnya sistem pengendalian intern dan kurangnya pengawasan, mendorong atau memberikan peluang terjadinya fraud (Akkeren dan Buckby 2015).

Panitia pengadaan merupakan salah satu pihak yang terkait dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah yang menentukan proses penawaran pengadaan barang/jasa/pekerjaan. Output dari panitia pengadaan adalah penentuan rekanan penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan pekerjaan, dan berbagai kesepakatan yang akan dituangkan dalam kontrak pekerjaan (Celentani dan Ganuza 2001). Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pelaksana pengadaan harus memiliki kualitas yang dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu integritas, kompetensi, independensi, dan objektivitas mereka (Arrowsmith 2010). Apabila panitia pengadaan kurang dalam memiliki integritas, independensi, dan objektivitas, maka tata kelola pengadaan menjadi kurang berkualitas sehingga menimbulkan peluang (opportunity) untuk individu atau kelompok untuk berperilaku fraud. Aspek ketiga dari fraud triangle adalah rationalization (rasionalisasi). Rasionalisasi merupakan aspek psychological dari pelaku fraud. Cohen et al. (2010) mengkaji aspek rasionalisasi ini ke dalam niat berbuat fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen atau eksogen (fraud/ penyimpangan/ kecurangan) yang dipengaruhi 4 (empat) variabel independen atau endogen (pressure/tekanan dari segi pendapatan panitia pengadaan, sysweak/ lemahnya sistem dan prosedur pengadaan, quality/kurangnya kualitas panitia pengadaan, dan intent/niat berbuat fraud).

Variabel independen yakni tekanan ( pressure) merupakan faktor yang dapat memicu adanya perilaku fraud, terutama secara finansial dengan pendapatan atau honor sebagai panitia pengadaan barang dan jasa yang kecil tidak sebanding dengan beratnya beban kerja dan tingginya risiko, maka sering menjadi pembenaran dalam melakukan fraud. Rezaee (2005) juga menyatakan bahwa insentif yang kurang memadai dapat berpengaruh terhadap fraud dalam penyajian pelaporan keuangan. Cohen et al. (2010) menguji bahwa perilaku fraud juga didorong oleh financial pressure. Mengacu pada fraud triangle theory yang dikembangkan oleh Cressey (1973), financial pressure merupakan faktor yang dapat memicu adanya perilaku fraud.

Dari pemikiran tersebut, dirumuskan proposisi bahwa penghasilan yang kurang memadai merupakan cerminan tekanan (pressure) dari segi keuangan yang dapat berpengaruh terhadap tindakan fraud yang dapat merugikan negara, maka hipotesis pertama diusulkan sebagai:

a. H 1 : Tekanan (Pressure) dari segi pendapatan panitia pengadaan berpengaruh positif pada tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Tersedianya sistem pengendalian intern yang baik dapat menjadi acuan bagi panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sehingga terarah dan tidak melakukan penyimpangan. Thai (2001) menyatakan bahwa sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa berpengaruh dalam keberhasilan suatu sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian Sartono (2006) menyatakan bahwa sistem dan prosedur yang tidak efektif, dan ketiadaan atau kurangnya pengawasan, memungkinkan untuk memberikan peluang tindakan fraud. Berdasarkan pemikiran di atas, banyaknya fraud yang terjadi diprediksikan dipengaruhi oleh masih ada kelemahan dalam sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, maka hipotesis alternatif kedua yang diusulkan adalah:

b. H 2 : Lemahnya sistem dan prosedur (sysweak) pengadaan berpengaruh positif pada tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pelaksana pengadaan harus memiliki kualitas yang dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu integritas, kompetensi, independensi, dan objektivitas mereka (Arrowsmith 2010). Apabila panitia pengadaan kurang dalam memiliki integritas, independensi, dan objektivitas, maka tata kelola pengadaan menjadi kurang berkualitas sehingga menimbulkan peluang (opportunity) untuk individu atau kelompok untuk berperilaku fraud. Hal ini juga didukung oleh penelitian Akkeren dan Buckby (2015) yang menunjukkan bahwa kurang memadainya tata kelola perusahaan dapat menjadi peluang (opportunity) individu untuk berperilaku fraud.

Dengan mengacu pada teori fraud triangle bahwa tindakan fraud terjadi karena adanya oppprtunity yang dalam penelitian ini adalah kurangnya kualitas panitia pengadaan maka dapat dibuat hipotesis yang ketiga yakni :

c. H 3 : Kurangnya kualitas (quality) panitia pengadaan berpengaruh positif pada tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Aspek ketiga dari fraud triangle adalah rationalization (rasionalisasi) dilihat dari niat untuk berbuat dan berperilaku pada tindakan fraud, Cohen et al. (2010). Apabila seseorang memandang atau mempersepsikan mudah melakukan fraud dan lingkungan yang mendukung fraud, maka yang bersangkutan akan mempunyai niat berbuat fraud, yang pada gilirannya akan berbuat fraud. Faktor ini dapat disebut self efficacy beliefs (keyakinan potensi diri) dari para pelaku fraud yang menjadi niat untuk berbuat fraud. Norma tersebut memengaruhi individu untuk berbuat fraud (Beck and Ajzen 1991a).

Demikian juga dikemukakan pada penelitian Cohen et al. (2010) bahwa faktor rasionalisasi yaitu sebuah niat (intent) berbuat fraud akan menyebabkan terjadinya fraud. berdasarkan pemikiran di tersebut, maka hipotesis keempat yang diusulkan dalam penelitian ini adalah:

d. H 4 : Niat (intent) berbuat fraud berpengaruh positif pada tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

**METODE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau survei dengan metode kuantitaif. Menurut Sugiyono, (2003 :14), metode kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penentuan Lokasi penelitian, Moleong (2007:132) menentukan cara terbaik untuk ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan. Penelitian ini dilakukan pada beberapa Kantor Akuntan Publik di kota Yogyakarta.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono (2008:115), “Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh auditor independen pada Kantor Akuntan Publik di kota Yogyakarta.

b. Sampel

Menurut Sugiyono (2008:116), “Sampel adalah sebagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki dari populasi tersebut”. Sedangkan menurut Arikunto (2008:116), “Penentuan pengambilan sampel sebagai berikut :

Apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-55% atau lebih tergantung sedikit banyaknya dari :

1) Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana.

2) Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya dana.

3) Besar kecilnya resiko yang ditnggung oleh oleh peneliti untuk meneliti yang resikonya besar, tentu saja jika sampelnya besar hasilnya akan lebih baik.

Sampel penelitian ini adalah bagian dari populasi tersebut yang bersedia menjadi responden penelitian. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan pemilihan sampel berdasarkan kemudahan (convencience sampling).

Metode convencience sampling ini memilih sampel dari elemen populasi (orang atau kejadian) yang datanya mudah diperoleh peneliti. Elemen populasi yang dipilih sebagai subjek adalah tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan murah (Nur Indriantoro, 2009:26). Penelitian ini menggunakan metode convencience sampling sebab metode ini mudah dilakukan. Metode pengambilan sampel ini dipilih berdasarkan kesediaan auditor untuk dijadikan sampel dalam penelitian.

**Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer dengan memberikan kuesioner kepada auditor independen dari beberapa kantor akuntan publik terpilih di kota Yogyakarta. Pengertian metode kuesioner atau angket menurut Sugiyono (2008:199), “Angket atau kuesioner merupakan tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab”.

**Operasional Variabel**

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Sedangkan Definisi Operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. (Hidayat, 2007).

a. Variabel Dependen atau eksogen.

1) Fraud atau Penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Menurut Sugiyono ( 2009:16), Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini variabel dependen adalah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa (fraud) yaitu serangkaian ketidak beresan (irregularities) mengenai perbuatan-perbuatan melawan hukum (illegal act), yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam ataupun dari luar organisasi dengan sengaja dalam pengadaan barang dan jasa untuk tujuan tertentu yang menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain, dan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara. Fraud atau kecurangan merupakan variabel dependen yang diukur dengan menggunakan skala likert. Setiap pertanyaan yang terdapat 9 (sembilan) pertanyaan diberi angka 1; sangat tidak setuju, 2; tidak setuju, 3; netral, 4; setuju, 5; sangat setuju.

b. Variabel Independen atau endogen

Menurut Sugiyono (2009: 13), Variabel Independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan timbulnya variabel terikat. Pada penelitian ini variabel independent adalah:

1) Tekanan (Pressure) dari segi pendapatan panitia pengadaan berpengaruh pada tindakan fraud (X1).

Tekanan (Pressure) dari segi pendapatan panitia pengadaan adalah kelayakan penghasilan sah (resmi) yang diterima oleh panitia pengadaan barang dan jasa menurut penilaian responden apakah dapat memenuhi gaya hidup dan sesuai dengan tanggung jawab para pelaku fraud, serta adanya pengeluaran instansi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administratif yang dipersepsikan responden. Tekanan (Pressure) dari segi pendapatan panitia pengadaan berpengaruh pada tindakan fraud merupakan variabel independen yang diukur dengan menggunakan skala likert. Setiap pertanyaan yang terdapat 3 (tiga) pertanyaan diberi angka 1; sangat tidak setuju, 2; tidak setuju, 3; netral, 4; setuju, 5; sangat setuju.

2) Lemahnya sistem dan prosedur (sysweak) pengadaan berpengaruh pada tindakan fraud (X2)

Lemahnya sistem dan prosedur dalam pengadaan barang dan jasa adalah kondisi yang menunjukkan masih adanya ketidakberesan dan kelemahan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa menurut penilaian responden. Lemahnya sistem dan prosedur pengadaan berpengaruh pada tindakan fraud merupakan variabel independen yang diukur dengan skala likert. Setiap pertanyaan yang dari 5 (lima) pertanyaan yang diajukan diberi angka 1; sagat tidak setuju, 2; tidak setuju, 3; netral, 4; setuju, 5; sangat setuju.

3) Kurangnya kualitas panitia pengadaan (quality) berpengaruh pada tindakan fraud (X3)

Kurangnya kualitas panitia pengadaan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya kualitas yang kurang pada panitia pengadaan barang dan jasa. Variabel ini diproksikan dengan persepsi responden yaitu sejauh mana penilaian responden terhadap kualitas personel panitia pengadaan audite yang melakukan penyimpangan pada saat responden melakukan audit secara umum dengan beberapa indikator: tingkat integritas, kompetensi, independensi, dan objektivitas sebagai panitia pengadaan barang dan jasa dalam menjalankan tugasnya. Kualitas panitia pengadaan berpengaruh pada tindakan fraud merupakan variabel independen yang diukur dengan skala likert. Terdapat 4 (empat) pertanyaan yang diajukan dan setiap pertanyaan diberi angka 1; sangat tidak setuju, 2; tidak setuju, 3;netral, 4; setuju, 5; sangat setuju.

4) Niat (intent) panitia pengadaan untuk berperilaku fraud (X4)

Niat merupakan aspek kognitif dan afektif untuk berbuat sesuatu tindakan. Variabel niat untuk berperilaku fraud merupakan aspek kognitif (niat) dan afektif (mampu atau mudahnya menutupi kecurangan) pelaku fraud yang dapat memicu berbuat fraud yang dipersepsikan oleh responden. Variabel niat panitia pengadaan untuk berperilaku fraud merupakan variabel independen yang diukur dengan skala likert. Didukung dengan 2 (dua) pertanyaan dengan setiap pertanyaan diberi angka 1; sangat tidak setuju, 2; tidak setuju, 3;netral, 4; setuju, 5; sangat setuju.

**Instrumen Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian mengacu pada penelitian Zulaika dan Paulus Th Basuki Hadiprajitno (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2016, Vol. 13, No. 2, hal 194 – 220), meliputi informasi pribadi responden serta 23 pertanyaan demi menunjang hasil penelitian yang lebih akurat.

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Uji instrumen dilakukan terlebih dahulu sebelum pengujian lain dilakukan agar instrumen dapat memperoleh hasil yang akurat.

1) Uji Validitas

Uji Validitas instrumen penelitian dilakukan untuk menunjukkan keabsahan dari instrumen yang akan dipakai pada penelitian. Menurut Arikunto (2006, hlm. 168), “ Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahan suatu instrumen”.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu koesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011: 52). Untuk mengetahui validitas angket maka peneliti menggunakan rumus korelasi Product Moment dari Pearson. Uji validitas ini dilakukan dengan bantuan SPSS.

a. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal-hal yang berkaitan dengan konstrukkonstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Pada penelitian ini digunakan metode pengukuran reliabilitas Cronbanch’s Alpha. Pengujian reliabilitias dengan teknik Cronbanch’sAlpha > 0,60, ini biasanya dilakukan untuk jenis data interval/esay (Sugiyono, 2005: 282).

Pengukuran Variabel

Skala pengukuran yang digunakan oleh peneliti untuk menyatakan tanggapan dari responden terhadap setiap pertanyaan yang diberikan adalah dengan menggunakan Skala Likert.

Menurut Sugiyono (2004), “ Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomenasosial”.

**Metode Analisis Data**

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berguna. (Ronald E. Walpole). Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono,2007:29).

2. Uji Asumsi Klasik.

Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dulu memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji multikolinearitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas.

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model sebuah regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya terdistribusi secara normal. Untuk mengetahui bentuk distribusi data, bisa dilakukan dengan grafik distribusi dan analisis statistik. Pengujian dengan grafik distribusi dilakukan dengan melihat grafik histrogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Dalam penelitian ini untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilakukan dengan program SPSS dengan analisis grafik Normal Probability Plot dan Uji Kolmogrov Smirnov (Ghozali, 2006).

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Gejala varians yang tidak sama ini disebut dengan heterokedastisitas, sedangkan adanya gejala residual yang sama dari satu pengamatan ke pengamatan lain disebut dengan hemokedastisitas (Santosa dan Ashari, 2005). Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik scatterplot anatara nilai variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID), dimana sumbu X adalah yang diprediksi dan sumbu Y adalah residual.

c. Uji Multikolinearitas.

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen (Ghozali, 2011:105).

d. Uji Autokorelasi.

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena masalah residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. (Ghozali, 2011).

3. Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ( X1, X2, .... Xn) dengan variabel dependen ( Y ). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen ( X1, X2, .... Xn) secara serentak terhadap variabel dependen ( Y ).

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi secara parsial dilakukan dengan membandingkan antara thitung dengan ttabel. Dengan tingkat signifikansi 0,05% atau 5%.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sebelum digunakan survei dilakukan pre-test kuesioner kepada 30 mahasiswa S1 Akuntansi peminatan auditing Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

a. Uji Validitas

Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan dengan skor total. Jika rhitung > rtabel, dengan N = 30 maka instrumen item-item atau pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid), variabel-variabel memiliki nilai rhitung lebih besar dari rtabel sehingga item-item dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitias dengan teknik Cronbanch’sAlpha > 0,60, ini biasanya dilakukan untuk jenis data interval/esay (Sugiyono, 2005: 282)

Maka dapat dilihat nilai reliabilitas dari variabel pressure (tekanan) dari segi pendapatan panitia pengadaan berpengaruh pada tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebesar 0,940. Pada lemahnya sistem dan prosedur panitia pengadaan berpengaruh pada tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ( Sysweak) sebesar 0,927. Kurangnya kualitas (Quality) panitia pengadaan berpengaruh pada tindakan fraud dalam panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah sebesar 0,928. Niat ( Intents) berbuat fraud pada panitia pengadaan berpengaruh pada tindakan fraud pada pengadaan barang dan jasa pemerintah sebesar 0,890. Fraud atau kecurangan sebesar 0,978. Dari nilai keseluruhan lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dikatakan reliabel.

**Analisis Data**

Penerapan pengumpulan data dari penelitian ini menyebarkan kuisioner dengan populasi seluruh auditor independen pada Kantor Akuntan Publik di kota Yogyakarta. Sampel penelitian adalah auditor independen dari Kantor Akuntansi Publik di kota Yogyakarta yang bersedia menjadi responden. Dari 13 Kantor Akuntan Publik hanya 6 perusahaan yang bersedia menjadi responden. Adapun hasil demografi responden adalah :

Tabel 1.1

Demografi responden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jumlah | | Persentase |
| **GENDER** |  |  |
| Perempuan | 15 | 41,67% |
| Laki-laki | 21 | 58,3% |
| **Total** | **36** | **100,0%** |
| **PENGALAMAN** |  |  |
| 1-3 tahun | 18 | 50% |
| >3-6 tahun | 9 | 25% |
| >6-9 tahun | 6 | 16,67% |
| >9-12 tahun | 3 | 8,33% |
| >12-15 tahun |  |  |
| >15 tahun |  |  |
| **Jumlah** | **36** | **100,0%** |
| **KELOMPOK UMUR** |  |  |
| 21-30 tahun | 25 | 69,44% |
| >30-35 tahun | 11 | 30,56% |
| >35-40 tahun |  |  |
| >40-45 tahun |  |  |
| >45-50 tahun |  |  |
| >50 tahun |  |  |
| **Jumlah** | **36** | **100,0%** |
| **MARITAL STATUS** |  |  |
| Tidak/belum menikah | 16 | 44,44% |
| Menikah | 20 | 55,56% |
| **Jumlah** | **36** | **100,0%** |
| **PENDIDIKAN** |  |  |
| D3 | 8 | 22,22% |
| S1 | 25 | 69,45% |
| S2 | 3 | 8,33% |
| **Jumlah** | **36** | **100,0%** |

Dari tabel tersebut data responden dapat dideskripsikan menjadi :

a. Deskripsi data responden berdasarkan gender.

Dari berbagai dilihat dari gendernya 58,3% responden berjenis kelamin laki-laki dan 41,67% berjenis kelamin perempuan.

b. Deskripsi data responden berdasarkan pengalaman kerja.

Dari segi pengalaman kerja sebagai auditor, responden dengan pengalaman dari 1tahun sampai 3 tahun sebesar 50%, pengalaman lebih dari 3 tahun sampai 6 tahun sebesar 25%, pengalaman lebih dari 6 tahun sampai 9 tahun sebesar 16,67% dan pengalaman kerja lebih dari 9 tahun sampai 12 tahun sebesar 8,33 %.

c. Deskripsi data responden berdasarkan kelompok umur.

Dari kelompok umur, responden dengan umur 21 tahun sampai 30 tahun sebesar 69,44% dan responden dengan umur diatas 30 tahun sampai umur 35 tahun sebesar 30,56%.

d. Deskripsi data responden berdasarkan marital status.

Dari segi martial status responden dengan status tidak atau belum menikah sebesar 44,44% dan responden dengan status sudah menikah sebesar 55,56%.

e. Deskripsi data responden berdasarkan jenjang pendidikan.

Dari segi jenjang pendidikan responden dengan pendidikan D3 sebesar 22,22%, responden dengan jenjang pendidikan S1 sebesar 69,45% dan responden dengan jenjang pendidikan S2 sebesar 8,33 %

Statistik deskriptif penelitian ini, semua variabel memiliki nilai rata-rata di atas nilai rata-rata teoretis. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung setuju dengan pernyataan dalam pengukuran variabel. Tingginya nilai fraud mempunyai makna bahwa responden cenderung setuju atas berbagai fenomena fraud yang terjadi. Semua variabel menunjukkan nilai rata-rata di atas satu standar deviasi, begitu juga untuk variabel pressure/ tekanan dari segi keuangan panitia pengadaan. Variabel presure menunjukkan jawaban responden yang setuju akan pernyataan tekanan pada keuangan menyebabkan terjadinya fraud, sedangkan variabel quality/ kurangnya kualitas panitia pengadaan dan sysweak/lemahnya sistem dan prosedur pengadaan juga menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi.

**Uji Asumsi Klasik**

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov (K-S). Uji Kolmogorov Smirnov digunakan untuk uji statistik apakah data terdistribusi normal atau tidak. Uji Kolmogorov Smirnov dengan ketentuan sebagai berikut: jika nilai signifikansi α > 0,05 maka data terdistribusi secara normal. Dari hasil pengujian diperoleh kolmogoros-Smirnov Z sebesar 0,717 dengan nilai signifikansi (Asymp.Sig.2-tailed) sebesar 0,683. Karena signifikansi lebih dari 10% maka nilai residual tersebut adalah normal.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, tidak ada pola yang jelas serta titik-titik tersebut menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,10 maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen, diketahui bahwa nilai tolerance semua variabel kurang dari 0,10, sedangkan nilai VIF semua variabel independen lebih kecil (kurang) dari 10,0. Berdasarkan hasil diatas bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson (DW Test), menunjukkan dl<d<du, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi autokorelasi.

4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda.

a. Analisis regresi linier berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan uji hipotesis pertama yaitu tekanan (pressure) pada segi keuangan panitia pengadaan yang berpengaruh pada tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, hipotesis kedua yaitu lemahnya sistem dan prosedur (sysweak) panitia pengadaan berpengaruh pada tindakan fraud dalam panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah, hipotesis ketiga yaitu kurangnya kualitas (quality) panitia pengadaan barang berpengaruh pada tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan hipotesis ke empat yaitu niat (intent) berbuat fraud panitia pengadaan berpengaruh terhadap tindakan Fraud atau kecurangan dalam panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Tekanan (pressure), sistem dan prosedur (sysweak), kualitas (quality) dan niat (intent) panitia pengadaan terhadap tindakan berbuat fraud. Dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar -0.364 dan koefisien regresi pressure, sysweak, quality dan intent sebesar 0.226, 0.160, 0.334 dan 0.315 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

Fraud = - 0.362 + 0.226 pressure (tekanan) pada keuangan panitia pengadaan + 0. 160 sysweak (sistem dan prosedur) pada panitia pengadaan + 0.334 quality (kualitas) panitia pengadaan + 0.315 intent (niat) panitia pengadaan bersikap fraud.

b. Uji Statistik T (Uji t).

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara parsial variabel independen terhdap variabel dependen nilai t hasil uji t disebut dengan nilai t hitung yang akan dibandingkan dengan nilai t tabel yang didapat dari tabel t. Apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan variabel independen yang dianalisis berpengaruh pada variabel dependen. Nilai t hitung dari hasil uji tdidapat dari tabel koefisien dari analisis regresi.

Analisis uji t dilakukan analisis uji pada fraud yang dipengaruhi oleh pressure, sysweak, quality dan intent, penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 36 (N=36) dan variabel (k=5). Sehingga nilai df =N-k= 36-5=31. T tabel yang didapat dri tabel t pada tingkat signifikan 0.05 adalah 2.040.

1) Jika signifikansi lebih besar dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, sebaliknya Ha diterima.

2) Jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, sebaliknya Ha diterima.

a) H1= Tekanan (Pressure) dari segi pendapatan panitia pengadaan berpengaruh pada tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung lebih besar dari ttabel 2.434>2.040 pada tarif signifikansi (0,021<0,050).

Nilai signifikan yang didapat lebih kecil dari 0.050 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima dan disimpulkan bahwa variabel (pressure) tekanan dari segi keuangan paitia pengadaan berpengaruh positif pada tindakan fraud.

b) H2 = Lemahnya sistem dan prosedur (sysweak) pengadaan berpengaruh pada tindakan penyimpangan (fraud) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung lebih besar dari ttabel 2.530>2.040 pada tarif signifikansi (0,017<0.050).

c) H3 = Kurangnya kualitas (quality) panitia pengadaan berpengaruh pada tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung lebih besar dari ttabel 3.057>2.040 pada tarif signifikansi 0.005<0.050

d) H4 = Niat (intent) berbuat fraud panitia pengadaan berpengaruh pada tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung lebih besar dari ttabel 3.030>2.040 pada tarif signifikansi (0.005<0.050)

**Pembahasan**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa **pengaruh financial pressure (pressure) panitia pengadaan terhadap tindakan fraud (fraud) dalam pengadaan barang dan jasa menurut persepsi auditor independen di kota Yogyakarta** adalah positif dan signifikan sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis pertama diterima. Hal penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pesepsi responden menunjukkan ada kecenderungan tekanan pada finansial yang terjadi pada panitia pengadaan sehingga tekanan finansial berpengaruh signifikan terhadap perilaku fraud. Oleh karena adanya tekanan finansial tersebut, maka hasil penelitian ini mendukung fraud triangle sebagaimana dikemukakan oleh Cressey (1973). Tekanan financial dalam penelitian ini menjadi pemicu procurement fraud. Cohen et al. (2010) serta Rijckeghem dan Weder (1997) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa tekanan finansial internal juga menjadi pemicu fraud. **Kelemahan sistem dan prosedur berpengaruh signifikan terhadap fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah**, Dalam penelitian ini, pengukuran kualitas panitia pengadaan menggunakan indikator sejauh mana tingkat integritas, kompetensi, independensi, dan objektivitas sebagai personel panitia pengadaan barang/jasa dalam menjalankan tugasnya dengan skala pengukuran kualitas yang kurang positif. Dari hasil analisis, diperoleh hasil bahwa kurang kualitasnya panitia pengadaan (Quality) berpengaruh signifikan terhadap perilaku fraud dengan koefisien sig. 0,002. Nilai sig. ini lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis ke tiga yang menyatakan bahwa kurang kualitasnya panitia pengadaan berpengaruh positif terhadap penyimpangan (fraud) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak dapat ditolak.dan arah hubungannya positif signifikan. Sistem dan prosedur pengadaan secara jelas sudah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

**Kurangnya kualitas (quality) panitia pengadaan berpengaruh terhadap tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut persepsi auditor independen di kota Yogyakarta.** Kurangnya kualitas panitia pengadaan dalam penelitian ini juga merupakan variabel proksi opportunity dalam fraud triangle. Dalam penelitian ini, pengukuran kualitas panitia pengadaan menggunakan indikator sejauh mana tingkat integritas, kompetensi, independensi, dan objektivitas sebagai personel panitia pengadaan barang/jasa dalam menjalankan tugasnya dengan skala pengukuran kualitas yang kurang positif. Dari hasil analisis, diperoleh hasil bahwa kurang kualitasnya panitia pengadaan (Quality) berpengaruh signifikan terhadap perilaku fraud dengan koefisien sig. 0,002. Nilai sig. ini lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis ke tiga yang menyatakan bahwa kurang kualitasnya panitia pengadaan berpengaruh positif terhadap penyimpangan (fraud) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak dapat ditolak. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa niat berbuat fraud merupakan variabel yang dipersepsikan oleh responden tentang adanya indikasi niat pelaku fraud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan adanya siasat atau mudahnya upaya menutupi tindakan fraud secara formal yang sebenarnya berbeda dengan substansinya.

**Niat (intent) berbuat fraud berpengaruh pada tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut persesepsi auditor independen di kota Yogyakarta.** Niat berperilaku tersebut pada gilirannya berpengaruh terhadap perilaku fraud. Dalam penelitian ini berpengaruh signifikan positif terhadap fraud dengan nilai sig. < 0,05. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa niat berbuat fraud ini disertai dengan adanya peluang, kurangnya integritas, serakah, persekongkolan dapat memicu ke dalam perbuatan fraud (Cohen et al. 2010; Beck and Ajzen 1991a).

**KESIMPULAN**

1. Pressure (tekanan) pada segi pendapatan panitia pengadaan berpengaruh positif terhadap perilaku fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah

2. Lemahnya sistem dan prosedur panitia pengadaan (sysweak) berpengaruh positif pada tindakan fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah.

3. Kurangnya kualitas (quality) panitia pengadaan berpengaruh positif pada tindakan fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah.

4. Niat (intent) berbuat fraud berpengaruh positif pada tindakan fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah.

**DAFTAR PUSTAKA**

A.Alimul Hidayat. 2007. *Metode Penelitian Kebidanan Dan Tehnik Analisis Data*. Surabaya: Salemba.

Agoes, S. dan I. C. Ardana. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi: tantangan pembangunan manusia seutuhnya*. Jakarta. Salemba.

Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. Organization Behavior and Human Decision Process. 50(2). 179-221.

Akkeren, J.V. and S. Buckby. 2015. *Perception on the Causec of Individual and Fraudulent Co-offending: View of Forensic Accountans.* Journal of Business Ethics. 1-22.

Albrecht, W. S., C. C. Albrecht, and C. O. Albrecht. 2004. *Fraud and Corporate Executives: Agency, Stewardship and Broken Trust.* Journal of Forensic Accounting, 5, 109-130.

Badan Pemeriksa Keuangan. 2012. *Kerugian Negara dalam Kasus Hambalang Rp 243 Milyar.* Diakses tanggal 12 April 2013, <http://www.merdeka.com/peristiwa/bpk-kerugian-negara-dalam-kasus-hambalang-rp-243-m.html>.

Badan Pemeriksa Keuangan. 2013. *BPK Temukan Ribuan Indikasi Penyimpangan.* Diakses tanggal 4 April 2013, <http://www.bpk.go.id/web/?p=14476>.

Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. *10.527 Kasus Kerugian Negara/Daerah Senilai Rp1,02 Triliun Belum Terselesaikan.* Diunduh tanggal 12 Januari 2016, http://www.bpk.go.id/news/.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 1999. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN).* Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Bectas, Mustafa. 2013. An Examination of the Elementary School Teacher’s preferred Teaching Methods and Instructional Tekhnologies in Terms of Various Variables in life Study Lesson. International Online

Boyton, William C., Johnson, Raymond N. And Walter G. Kell. 2001. *Modern Auditing. New York*. John Wiley & Sons,Inc.

Cressey, D. R. 1973. *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement.* Montclair, NJ: Patterson Smith.

Daftar Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik Yang Terdaftar Sebagai Auditor Bank di Otoritas Jasa Keuangan. Diakses 31 Maret 2016, dari <https://mail-attachment.googleusercontent.com>.

Daigle, R. J., D. C. Hayes, and P. W. Morris. 2014. *Dr. Phil and Montel Help AIS Students “Get Real” with the Fraud Triangle.* Journal of Accounting Education, 32 (2), 146-159.

Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hardjowijono, B. dan Hayie Muhammad. 2009. *Prinsip Dasar dan Kerangka Hukum Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.* Jakarta. Indonesia Procurement Watch.

Hemamusa, A. 2011. *Pengadaan Barang dan Jasa, Korupsi, dan Reformasi Birokrasi.* Diakses tanggal 13 Maret 2012, dari <http://www.lkpp.go.id>.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IKI). 2009. *Standar Keuangan Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik (SAK ETAP).* Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia.

Indriantoro, Nur., dan Bambang Supomo. 2009. *Metodologi penelitian bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen.* Edisi Pertama. Yogyakarta:BPFE Yogyakarta.

Jatiningtyas, Nurani. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instanti Pemerintah di Wilayah Semarang.* Sktipsi. Semarang : Fakultas Ekonomi UNDIP.

Kurniasari, N. T. 2018. *Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah.* Journal IPB. Volume 10. Nomor Khusus.

Lambsdorff, J. G. 1999. *Corruption in Empirical Research — A Review.* Diakses tanggal 12 Maret 2012, dari <http://www.transparency.org>.

Luksadia. 2017. Daftar KAP (Kantor Akuntan Publik) yang ada di Yogyakarta. Diakses tanggal 26 Januari 2017, dari <http://lukman-s.blogspot.com/2017/01/daftar-kap-kantor-akuntan-publik-yang.html>.

Mustafa, Khalid. 2013. *Pengadaan Barang Dan Jasa.* Diakses September 2013, dari <http://www.khalidmustafa.com>

Massier, Willim F., Glover Steven M. Jr, and Prawit Douglas F. Jr. 2006. *Auditing and Assurance Serviced Systematic Approach.* Buku II. Edisi 4. Diterjemahkan oleh : Nuri Hinduan. Salemba empat. Jakarta.

Murphy, P. R. and C. Free. 2016. *Broadening the Fraud Triangle: Instrumental Climate and Fraud.* Behavioral Research in Accounting, 28 (1), 41-56.

Nurharjanti, N. N. 2017*. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/ Jasa di Lembaga Publik*. Jurnal Akuntansi dan Investasi. Volume 18. Nomor 02. 209-221, dari <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai>.

Othman, Z., S. Rohami and F. Z. A. Hamid. 2014*. Corruption — Why Do They Do It? Procedia – Social and Behavioral Sciences.* 164, 248-257.

Othman, R. et al. 2015*. Fraud Detection and Prevention Methods in the Malaysian Public Sector: Accountants’ and Internal Auditors’ Perceptions.* Procedia Economics and Finance, 28, 59-67.

Poernomo, H. 2013a. *BPK RI Serahkan IHPS II Tahun 2012 ke DPR RI.* Diakses tanggal 8 April 2013, <http://www.bpk.go.id/web/?p=14466>